



RINGKASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 selain berpedoman pada RPJMD, juga pada RKP dan program strategis nasional yang dialokasikan di wilayah Riau, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan di atas, menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 menerapkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan melalui pelibatan DPRD pada saat konsultasi publik, musrenbang RKPD maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan ke Bappedalitbang Provinsi Riau melalui *e-planning*.

Penerapan pendekatan substansi perencanaan secara holistik- tematik, integratif dan spasial dilakukan pada proses penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Prioritas pembangunan Riau Tahun 2021 disusun secara holistik-tematik dan integratif dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan RPJMD serta diselenggarakan dengan prioritas nasional Tahun 2021.

Pendekatan spasial juga tidak ketinggalan diterapkan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, yaitu melalui *e-planning* yang telah dilengkapi dengan lokasi setiap kegiatan, serta penentuan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Riau berdasarkan aspek kewilayah sesuai dengan RTRW Riau.

- a. Kebijakan anggaran belanja *money follow* program. Penerapan kebijakan belanja *money follow program* telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2018, sebagaimana kebijakan pemerintah. Usulan program dan kegiatan pada penyusunan Renja PD dan RKPD dibahas dan diverifikasi oleh Bappedalitbang.

- b. Berbasis pada *e-planning*. Penerapan *e-planning* sebagai system informasi perencanaan pembangunan sudah diterapkan di Provinsi Riau sejak Tahun 2015. Sistem tersebut terus dikembangkan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada tahap perencanaan dan kaitannya dengan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 di mana Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 adalah ***“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”***.

Dalam mewujudkan visi dimaksud, maka dirumuskan beberapa misi antara lain:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi.

Memperhatikan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Riau serta berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah dan memperhatikan prioritas nasional, maka tema perencanaan pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah :

“MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI, PERTANIAN, PARIWISATA YANG MENDORONG PERDAGANGAN DAN JASA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI”

II. PERMASALAHAN

Rumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu : Industri, Pertanian, Pariwisata, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

1. Industri

- a. Belum berkembangnya industri hilir dan Stagnansi pengembangan kawasan industri.
- b. Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi.

2. Pertanian

- a. Rendahnya produktivitas sektor pertanian
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal
- c. Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar.
- d. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah

3. Pariwisata

- a. Pelestarian budaya melayu belum optimal
- b. Karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi masih rendah.
- c. Belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya Budaya Melayu
- d. Terbatasnya aksesibilitas dan fasilitas destinasi wisata dan pemasaran pariwisata.
- e. Pengembangan Ekonomi Kreatif belum Optimal.

4. Infrastruktur

- a. Kerusakan jalan dan sistem transportasi belum berkembang, serta pelayanan Pelabuhan belum optimal
- b. Terbatasnya akses air bersih dan air minum, serta pengelolaan sampah dan Air limbah belum baik.
- c. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan ketersediaan infrastruktur dasar belum maksimal
- d. Kebutuhan energi listrik meningkat, belum optimalnya cakupan pelayanan energi
- e. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan Irigasi
- f. Terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, perubahan tata guna dan fungsi hutan dan lahan serta okupasi kawasan konservasi.
- g. Pencemaran air pada 4 sungai besar, terjadinya kebakaran lahan dan hutan
- h. Rendahnya pemanfaatan potensi pantai/pesisir dan tingginya tingkat abrasi.

5. Sumber Daya Manusia

- a. Akses pelayanan pendidikan, masih rendahnya dan rasio ketersediaan sekolah belum memenuhi standar, guru belum berkualifikasi S-1/D-IV dan Penyandang disabilitas belum atau tidak bersekolah.
- b. Masih rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan, prevalensi Balita Gizi Buruk masih tinggi dan meningkatnya kasus penyakit menular.
- c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar.
- d. Terdapat ketimpangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. diskriminasi dalam pemberian upah/gaji antara laki-laki dengan perempuan dan masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Reses Pertama Periode 2019-2020 DPRD Provinsi Riau, terdapat 6.003 usulan kegiatan yang dikelompokkan dalam 82 rumusan permasalahan.

Rumusan Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
 - a) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
 - b) Keterbatasan Masyarakat untuk Mengenyam Pendidikan Pasca Sarjana
 - c) Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - d) Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan S1 dan D3
 - e) Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - f) Perlunya Sertifikasi bagi siswa SMK
2. Kesehatan
 - a) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
 - b) Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit
 - c) Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
 - d) Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat
 - e) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak
 - b) Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
 - c) Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
 - d) Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai
 - e) Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai
 - f) Perlunya Penanggulangan Longsor Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai
 - g) Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai
 - h) Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai
 - i) Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
 - j) Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
 - k) Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
 - b) Kurangnya Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 - c) Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadai dan Rusak
 - d) Belum optimalnya ketersediaan data base dan penanganan kawasan kumuh serta ketersediaan infrastruktur dasar
5. Sosial
 - a) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
 - b) Kurangnya Penyediaan Layanan Mobil Jenazah untuk Evakuasi Warga yang Meninggal
 - c) Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
 - d) Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat
 - e) Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan rumah ibadah
 - f) Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
 - g) Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti

6. Pertanian
 - a) Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - b) Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air (Water Management)
 - c) Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
 - d) Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen
 - e) Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - f) Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - g) Belum tersedia pengaturan air di lahan pertanian dan perkebunan
 - h) Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - i) Minimnya Sarana Prasarana Perbenihan Pertanian
7. Pangan

Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan
8. Kelautan dan Perikanan
 - a) Masih Rendahnya Produksi Perikanan
 - b) Kurangnya Penguatan dan Pengembangan
 - c) Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kec
 - d) Kurangnya Sarana dan Prasarana UPT Perikanan
 - e) Kurangnya Sarana dan Prasarana UPT Bididaya Perikanan
 - f) Kurangnya Sarana dan Prasarana UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - g) Kurangnya Sarana dan Prasarana UPT Pelabuhan Perikanan
 - h) Kurangnya Sarana dan Prasarana UPT Perikanan Wilayah I, II dan III
 - i) Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata
9. Pariwisata
 - a) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisataaan
 - b) Kurangnya Event Kepariwisataaan Penunjang Promosi Wisata Daerah
 - c) Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
11. Perhubungan

Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
12. Komunikasi dan Informatika

Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau
13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Perlunya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat
 - b) Rendahnya Tingkat Investasi di Provinsi Riau
 - c) Minimnya Pengembangan UMKM
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
 - b) Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
15. Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga

- b) Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga Bertaraf Internasional di Provinsi Riau
 - Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan
 - c) Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
16. Lingkungan Hidup
Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Kehutanan
- a) Rendahnya pemanfaatan potensi pantai/pesisir dan tingginya tingkat abrasi
 - b) Minimnya Sarana Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/di Tingkat Tapak
 - c) Minimnya alat pemadam kebakaran hutan dan lahan yang tersedia di masyarakat
 - d) Kurangnya Sarana dan Prasarana Taman Hutan Raya (Tahura)
18. Kebudayaan
- a) Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya
 - b) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
19. Perpustakaan
Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
20. Kearsipan
Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
21. Penanaman Modal
Masih Rendahnya Investasi
22. Energi Dan Sumber Daya Mineral
Belum Optimalnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan
23. Perindustrian
Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
24. Transmigrasi
Perlunya Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Sosial Ekonomi dan Budaya
25. Penelitian dan Pengembangan
Perlunya Kegiatan Penelitian dalam Rangka Penetapan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
26. Tenaga Kerja
- a) Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
 - b) Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2021, difokuskan kepada :

- 1) Pengembangan Industri.
- 2) Pengembangan Pertanian
- 3) Pengembangan Pariwisata
- 4) Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing.

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Prioritas pembangunan, terdiri dari arah kebijakan, program prioritas, kegiatan strategis yang mendukung langsung pencapaian kinerja, serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

No.	Prioritas	Deskripsi
1	Pengembangan Industri	Meningkatkan produksi hasil industri serta memperbaiki iklim dan promosi Investasi
2	Pengembangan Pertanian	Meningkatkan produksi pertanian, serta menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
3	Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata, meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu, meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan kompetensi wirausaha muda
4	Pembangunan Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Memantapkan jalan dan jembatan, mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, memantapkan Pelabuhan, meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh, meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah, meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir, memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS, menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
5	Pengembangan Sdm yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan

No.	Prioritas	Deskripsi
		kelangsungan hidup, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan, meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

1. Prioritas Industri.

a) Arah Kebijakan :

Diharapkan akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 2,93%-3,2%, Gini Rasio 0,284, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,96%, dengan 3 (tiga) arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan produksi hasil industri;
- 2) Memperbaiki iklim dan promosi Investasi;
- 3) Dukungan Infrastruktur;

b) Program Prioritas :

Terdapat 5 (lima) program prioritas, yaitu :

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri;
- 2) Program Kerjasama, Fasilitasi dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 3) Program Peningkatan Investasi;
- 4) Program Penyelenggaraan Perizinan;
- 5) Program Preservasi Jalan dan Jembatan;

c) Kegiatan Strategis :

Terdapat 7 (tujuh) Kegiatan Strategis Industri :

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. Industri Logam
- 2) Peningkatan Kapasitas dan pengembangan UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan
- 3) Pengembangan Daerah Baru Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)
- 4) Akses Permodalan Bagi KUMKM untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat
- 5) Pengembangan One Village One Product (OVOP) di Provinsi Riau
- 6) Pembinaan dan pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau
- 7) Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan.

d) Sasaran :

Sasaran yang akan tercapai Program Prioritas Industri :

- 1) Persentase pertumbuhan nilai output industri 10,94%
- 2) Kawasan Industri yang beroperasi 1 (satu) kawasan industri, dimana didalam kebijakan nasional yang telah ditetapkan kawasan industri tanjung buton, kawasan industri tenayan dan PKSBN Bengkalis menjadi bagian program strategis nasional.
- 3) Jumlah nilai investasi PMA/PMDN Rp.24,8 triliun. Pada tahun 2019 realisasi sudah melebihi target 2021 dengan nilai Rp. 40,77 triliun;

2. Prioritas Pertanian.

a) Arah Kebijakan :

Indikator capaian kinerjanya adalah Skor Indeks Ketahanan Pangan 54, dan luas lahan pertanian terairi irigasi 26,3%.

Adapun arah kebijakannya adalah :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian
- 2) Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
- 3) Dukungan Irigasi

b) Program Prioritas :

Terdapat 8 (delapan) program prioritas, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian;
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
- 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 6) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 7) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 8) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

c) Kegiatan Strategis :

Terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan Strategis Pertanian :

- 1) Pengembangan dan perbaikan irigasi tersier
- 2) Peningkatan ekstensifikasi padi dan jagung
- 3) Pengembangan perbenihan tanaman pangan, hortikultura
- 4) Pengembangan sumber air pertanian melalui irigasi perpompaan
- 5) Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat
- 6) Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)
- 7) Pengembangan agribisnis peternakan
- 8) Pendistribusian ternak sapi kepada masyarakat
- 9) Bantuan sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
- 10) Pengembangan sarana dan pra sarana perikanan budidaya

d) Sasaran :

Sasaran yang ingin capai melalui kegiatan strategis yang telah dirumuskan, yaitu :

- 1) Produksi Pertanian sebanyak 492.472,92Ton;

- 2) Produksi Perkebunan sebanyak 884.793,60 Ton;
- 3) Jumlah Populasi Ternak sebanyak 519.341,00 ekor;
- 4) Produksi Perikanan sebanyak 276.536,31 Ton.

3. Prioritas Pariwisata.

a) Arah Kebijakan :

Pengembangan Pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara dengan jumlah kurang lebih sebanyak 200.319 orang, pengeluaran wisatawan manca negara tersebut sebesar Rp.2.058,26 Miliar dan peningkatan pemajuan Budaya Melayu Riau sebesar 18,18%. Prioritas Pariwisata didukung dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata;
- 3) Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata, dan
- 4) Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu.

b) Program Prioritas :

Terdapat 7 (tujuh) program prioritas, yaitu :

- 1) Program pengelolaan dan pengembangan kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pembangunan Jalan dan jembatan
- 4) Program Pemasaran Pariwisata
- 5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
- 6) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 7) Program Pendukung Pariwisata

c) Kegiatan Strategis :

Terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan Strategis Pariwisata :

- 1) Pengembangan Cagar Budaya
- 2) Perhelatan Tamaddun Melayu
- 3) Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melayu Se- Provinsi Riau
- 4) Peningkatan sarana dan pra sarana destinasi pariwisata prioritas
- 5) Pembangunan jalan provinsi wilayah I/II
- 6) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri
- 7) Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
- 8) Pengembangan Pasar Wista dan Kemitraan Pariwisata
- 9) Pengembangan Event-Event pariwisata daerah
- 10) Pembinaan Kreatifitas/Usaha Ekonomi Masyarakat di Sekitar Objek Wisata se Provinsi Riau.

d) Sasaran :

Melalui arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan strategis tersebut, diharapkan akan mencapai sasaran Pemajuan Objek Budaya sebesar 25% dan Kawasan Strategis Pariwisata sejumlah 3 (tiga) lokasi.

4. Prioritas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

a) Arah Kebijakan :

Prioritas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian presentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang sebesar **0,63 %**, Layanan Air minum **73,44 %**, Rasio Elektrifikasi **94,00** dan nilai IKLH **68,00**, memiliki 3 (empat), arah kebijakan, yaitu :

- 1) Memantapkan jalan dan jembatan
- 2) Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
- 3) Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir.

b) Program Prioritas :

Terdapat 10 (sepuluh) program prioritas, yaitu :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 2) Program Preservasi jalan dan jembatan
- 3) Program penataan dan peningkatan kualitas permukiman dan kawasan permukiman
- 4) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 5) Program penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan
- 6) Program penataan bangunan dan lingkungan
- 7) Program pengembangan energi dan ketenagalistrikan
- 8) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 9) Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan
- 10) Program perhubungan laut.

c) Kegiatan Strategis :

Pencapaian target, sasaran akan didukung melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah dirumuskan, antara lain :

- 1) Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah I
- 2) Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah II
- 3) Preservasi Jalan Provinsi Wilayah I
- 4) Preservasi Jalan Provinsi Wilayah II
- 5) Pembangunan Jembatan Provinsi wilayah I
- 6) Pembangunan Jalan Provinsi Wilayah II
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan
- 8) Pengadaan dan Pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi
- 9) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 10) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Riau.

d) Sasaran :

- 1) Presentase kemantapan ruas jalan Provinsi 65,30 %
- 2) Presentase peningkatan layanan air minum 87,78%
- 3) jumlah RTS yang teraliri Listrik 6.000 RTS
- 4) Jumlah pelabuhan yang dipelihara 6 Pelabuhan.

5. Prioritas Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing.

a) Arah Kebijakan :

Prioritas Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing, ditujukan untuk pencapaian nilai IPM sebesar 73,13, Rata-rata Lama Sekolah 9,04 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,74 tahun dan Angka Harapan Hidup 71,67 tahun.

Arah kebijakan Prioritas Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing, adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan akses Pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
- 3) Meningkatkan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
- 5) Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- 7) Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan
- 8) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
- 9) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
- 10) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
- 11) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
- 12) Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan
- 13) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin

b) Program Prioritas :

Terdapat 17 (tujuhbelas) program prioritas, yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
- 2) Program bantuan operasional Sekolah
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pendidikan khusus dan layanan khusus
- 5) Program Pembiayaan Kesehatan
- 6) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 7) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 8) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
- 10) Program pembinaan dan pengembangan olahraga
- 11) Program Keluarga Berencana
- 12) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 13) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 14) Program penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial
- 15) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 16) Program rehabilitasi sosial
- 17) Program pemberdayaan sosial.

c) Kegiatan Strategis :

Pencapaian target, sasaran akan didukung melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah dirumuskan, antara lain :

- 1) Revitalisasi SMA Wilayah II, III dan IV
- 2) Rehabilitasi SMA Wilayah I, II, III, IV dan Kota Pekanbaru
- 3) Pembangunan USB SMA Wilayah III dan IV
- 4) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah I, II, III , IV dan Kota Pekanbaru
- 5) Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah III, III , IV dan Kota Pekanbaru
- 6) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah I, II, III , IV dan Kota Pekanbaru
- 7) Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah I, II, III , IV dan Kota Pekanbaru
- 8) Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah I, II, III dan IV
- 9) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah I, II, III, IV dan Kota Pekanbaru
- 10) Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan /BOS Daerah
- 11) Pemberian Bea siswa pada Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Provinsi Riau (Termasuk Beasiswa Luar Negeri)
- 12) Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik
- 13) Pemberian Beasiswa Bidik Misi
- 14) Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau
- 15) Peningkatan Kesejahteraan Guru Marginal
- 16) Penyelenggaraan Pendidikan SLB
- 17) Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
- 18) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN
- 19) Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis
- 20) Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau
- 21) Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar(PPLP)
- 22) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 23) Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dari dan ke Embarkasi
- 24) Penyelenggaraan Lomba Baca dan Hafalan Al-Qur'an dan Hadits
- 25) Pendidikan anak putus sekolah (melalui BOSDA)
- 26) Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja.

d) Sasaran :

Melalui arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan strategis tersebut, diharapkan akan mencapai sasaran yang ditargetkan, yaitu :

- 1) APK SMA Sederajat **85,56 %**
- 2) APM SMA Sederajat **69,32 %**
- 3) Akreditasi SMA Sederajat nilai minimal B, **82,83 %**
- 4) Jumlah penerima bea siswa, **3.792**
- 5) Anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses Pendidikan **89,32 %**
- 6) Persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar **85,00 %**
- 7) Jumlah cabang olahraga yang berprestasi **15**
- 8) Persentase penataan kebijakan keagamaan & kesejahteraan sosial **100%**

IV. KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2021

Dari lima prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau, terdapat 82 (delapanpuluh dua) program prioritas dan 405 (empatatus lima) kegiatan strategis, dengan kebutuhan pagu sebesar Rp. 3,43 Triliun, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Prioritas	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Kebutuhan Dana (Miliar Rupiah.)
1	Pengembangan Industri	8	47	102,20
2	Pengembangan Pertanian	12	62	80,02
3	Pengembangan Pariwisata	10	38	44,28
4	Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21	196	1.159,48
5	Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	31	62	2.046,25
	JUMLAH	82	405	3,432,23

V. TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Secara umum pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2018, di mana tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 2,84% lebih baik daripada tahun 2018 yang hanya 2,34%. Untuk Tahun 2021 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diharapkan mencapai 2,93 - 3,2%.

Untuk indikator pembangunan lainnya pada tahun 2019 juga menunjukkan trend lebih baik, yakni :

1. Tingkat kemiskinan menurun 0,31% dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2021 target pencapaian sebesar 6,62%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 5,97%, lebih baik 0,23% dibandingkan tahun 2018, sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 adalah sebesar 5,96%.
3. Indeks Gini, pada tahun 2019 pencapaian sebesar 0,331 poin, membaik dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 0,347 poin, dan target pencapaian tahun 2021 adalah 0,284 poin.
4. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Tahun 2019 IPM Provinsi Riau adalah sebesar 73 Poin, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM terdiri dari 4 (empat) komponen penyusun, yaitu : Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian tahun 2019 sebesar 13,4 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,03 tahun, Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) 71,48 tahun dan Pengeluaran Perkapita Per Tahun yang disesuaikan sebesar Rp.11.255.000,-.

Pencapaian tahun 2019 akan terus ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang telah dirumuskan khususnya pada prioritas pembangunan ke 5 (lima), yakni Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing.

VI. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Sinkronisasi RKP dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021

Penyusunan RKPD tahun 2021 harus sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, dimana tema RKP Nasional dan prioritas serta target indikator utama adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	RKP Tahun 2021	RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
1	Tema	Meningkatkan Industri dan Pariwisata di berbagai wilayah didukung oleh investasi	Memantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang Mendorong Perdagangan dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
2	Indeks Pembangunan Manusia	70.72 Poin	73,13
3	Pertumbuhan Ekonomi 5.50 %	5.50 %	2,93 %
4	Tingkat Pengangguran Terbuka 6.12 %	6.12 %	5,96 %
5	Tingkat Kemiskinan	7.27 %	6,62 %
6	Prioritas :	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan b. Pengembangan Wilayah, untuk mengurangi kesenjangan c. Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan e. Infrastruktur, untuk ekonomi dan pelayanan dasar f. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim g. Stabilitas Polhukhankam dan transpormasi Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Industri b. Pengembangan Pertanian c. Pengembangan Pariwisata d. Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan e. Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Sinkronisasi dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021se Provinsi Riau

a) Tema RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH	TEMA RKPD
1	Kuantan Singingi	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Penguatan Kapasitas Aparatur, Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatkan Aksesibilitas Pendukung Perekonomian, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Berorientasi Produktifitas dan Pelestarian Budaya Lokal Berbasis Permasalahan
2	Indragiri Hulu	Pemantapan Pembangunan untuk Mewujudkan Indragiri Hulu yang lebih Sejahtera
3	Indragiri Hilir	Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir
4	Pelalawan	Peningkatan Keterpaduan Program Pembangunan yang Inovatif Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Masyarakat Yang Aman dan Sejahtera
5	Siak	Peningkatan Kualitas SDM Yang Agamis dan Berbudaya Melayu
6	Kampar	Memacu investasi dan Sinergitas Antar Sektor Serta Dunia Usaha Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
7	Rokan Hulu	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang handal
8	Bengkalis	"Pemantapan Pembangunan Yang Berkualitas dan Berdaya Saing"
9	Rokan Hilir	Memantapkan Pemberdayaan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Mutu Kesejahteraan Rakyat
10	Kepulauan Meranti	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pengembangan Industri Komoditas Unggulan Lokal
11	Pekanbaru	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif
12	Dumai	Pemantapan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai yang makmur dan madani

b) Prioritas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

NO.	DAERAH	PRIORITAS
1	Kuantan Singingi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi 4. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah 5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 6. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
2	Indragiri Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Pembangunan Infrastruktur 2. Pemantapan Pembangunan Ekonomi 3. Peningkatan SDM yang Berdaya Saing 4. Pemantapan Pembangunan Sektor Pertanian 5. Pengembangan Destinasi Wisata
3	Indragiri Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kinerja pelayanan publik 2. Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat 3. Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan 4. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan 6. Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing 7. Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa 8. Meningkatkan partisipasi sosial 9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 10. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial 11. Menurunkan tingkat pengangguran 12. Menurunkan tingkat kemiskinan 13. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
4	Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelalawan Sehat 2. Pelalawan Cerdas 3. Pelalawan Terang 4. Pelalawan Lancar 5. Pelalawan Makmur 6. Pelalawan Eksotis 7. Pelalawan Inovatif

NO.	DAERAH	PRIORITAS
5	Siak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 3. Pengembangan Pariwisata 4. Peningkatan Infrastruktur Dasar 5. Pelestarian Lingkungan Hidup 6. Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Pertanian, Pariwisata, dan KITB) 7. Pengembangan Ekonomi Kreatif 8. Peningkatan Pelayanan Publik
6	Kampar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumberdaya manusia yang beradab, berbudaya, beriman, dan bertaqwa. 2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang profesional maju dan berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan. 3. Struktur perekonomian daerah yang kuat dan mantap berbasis potensi lokal, berdaya saing dan berkelanjutan. 4. Pengembangan wilayah dan pengelolaan sumberdaya alam yang efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sistem infrastruktur yang terintegrasi.
7	Rokan Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang handal 2. Mementapkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar daerah mendukung pembangunan pariwisata daerah dan pertanian 3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya secara berkelanjutan 4. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dengan membangun system monitoring dan evaluasi terintegratif yang berorientasi hasil untuk pelayanan publik yang memuaskan 5. Menjamin keberlanjutan keadaan yang kondusif dan keharmonisan hubungan dalam keanekaragaman budaya dan agama untuk mendukung investasi dalam peningkatan ekonomi daerah
8	Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; 2. Pemantapan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan 3. Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; 4. Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan; dan 5. Penyiapan pemilihan daerah yang aman, tertib dan rendah konflik.
9	Rokan Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pendidikan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

NO.	DAERAH	PRIORITAS
		2. Pembangunan Kapasitas Birokrasi Pemerintah 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas daerah 4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat berbasis Potensi Daerah 5. Meningkatkan pemberdayaan Desa dan Ekonomi Kreatif Pedesaan
10	Kepulauan Meranti	1. Menumbuhkembangkan industri sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk. 2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan terutama daerah tertinggal dan terisolir serta perlu penanganan khusus. 3. Meningkatkan infrastruktur dasar terutama infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kawasan niaga. 4. Peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan tata kelola sampah dan limbah serta pengendalian tata ruang. 5. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government).
11	Pekanbaru	1. Pengembangan Kawasan Industri Tenayan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RW dan Rumah Ibadah 3. Penanggulangan Banjir 4. Pengelolaan Sampah 5. Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 6. Peningkatan Sektor Pariwisata 7. Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan, Air minum perpipaan dan Air Limbah
12	Dumai	1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar 2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan 3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan 4. Pemantapan pelayanan publik

c) Target Indikator Utama RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut ::

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)
1	Kuantan Singingi	5.04	8.33	4.97	70.50
2	Indragiri Hulu	4.24	5.80	4.50	72.77
3	Indragiri Hilir	5.26	7.30	2.86	68.08
4	Pelalawan	5.00	8.50	3.50	74.46
5	Siak	2.27	4.45	4.01	74.42
6	Kampar	2.96	7.85	5.06	72.90
7	Rokan Hulu	4.90	10.29	5.13	70.00
8	Bengkalis	1.24	6.00	7.15	73.59
9	Rokan Hilir	1.00	8.00	6.00	69.30
10	Kep. Meranti	4.50	23.50	7.45	67.11
11	Pekanbaru	6.10	2.83	8.39	81.00
12	Dumai	4.42	4.34	6.98	74.80

Pekanbaru, 20 April 2020

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU**



Drs. YAN PRANA JAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19651018 199503 1 001